

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan suatu kelompok usaha yang memanfaatkan sumber daya dari sektor pertanian dan sektor perdagangan. Dimana kelompok usaha ini memiliki keunggulan dalam sisi penyerapan tenaga kerja yang banyak, sehingga dapat membantu proses pemerataan yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi negara (Anggraini dan Hakim, 2013). Sedangkan menurut pendapat (Rudjito, 2003) UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru serta juga meningkatkan devisa Negara dengan melalui pajak badan usaha.

UMKM sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini terbukti ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998, yaitu UMKM dapat bertahan dari krisis ekonomi tersebut, sedangkan perusahaan-perusahaan besar mengalami kolaps akibat krisis. Menurut Semaun (2015) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat usaha kecil menengah bertahan dari segala krisis, yaitu UMKM tidak memiliki utang luar negeri, UMKM dianggap unbankable sehingga tidak banyaknya utang kepada perbankan, penggunaan input lokal, dan UMKM berorientasi ekspor.

Menurut (Rosenfeld, 2002), pengembangan UMKM merupakan penggerak pembangunan Nasional. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diupayakan agar dapat menjangkau dan merata sampai daerah pedesaan.

Menurut UU No. 20 tahun 2008 mengklasifikasi UMKM berdasarkan asset dan omset tiap skala usaha sebagai berikut:

Tabel 1.1
Klasifikasi UMKM Berdasarkan Asset dan Omset Skala Usaha

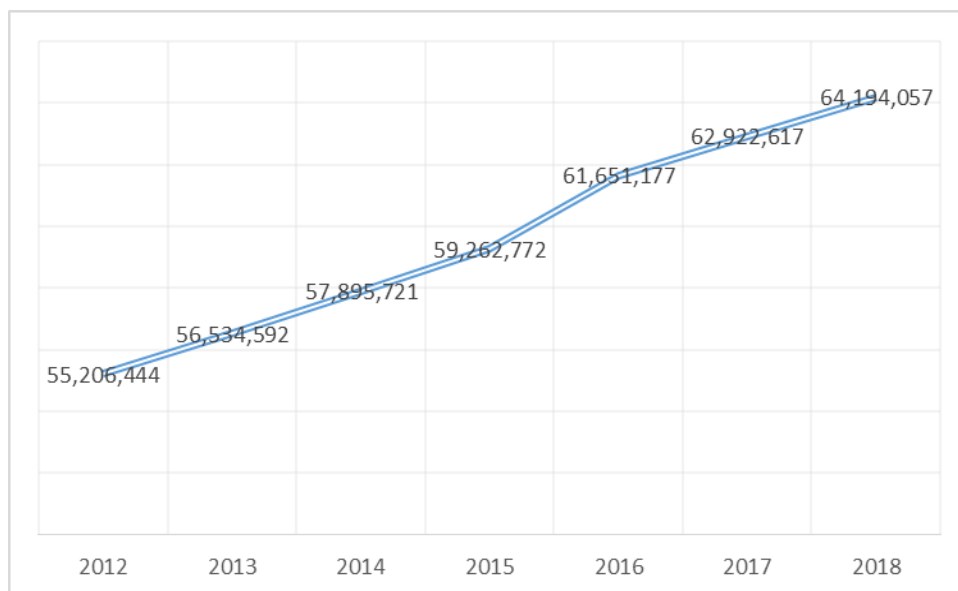
Skala Usaha	Kriteria	
	Kekayaan bersih	Hasil omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp. 300 juta
Usaha Kecil	>Rp 50 juta-Rp 500 juta	>Rp 300 juta-Rp 2,5 milyar
Usaha Menengah	>RP 500 juta – Rp 10 Milyar	>RP 2,5 Milyar – Rp 50 Milyar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

Dari tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa skala usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur Undang-undang ini dengan kriteria asset Rp 50 juta, kriteria omset maksimal Rp 300 juta. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dengan kriteria asset Rp50 juta – Rp 500 juta dan kriteria omset Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar rupiah. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dengan kriteria asset Rp 500 juta – Rp 10 miliar dan kriteria omset > Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.

Gambar grafik 1.1
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Tahun 2012-2017



Sumber : KEMENKOP-UMKM yang diolah dari data BPS(2017)

Berdasarkan gambar grafik 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah UMKM dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2012 merupakan jumlah UMKM dalam kurun waktu 6 tahun terakhir berjumlah 55.206.444 kemudian pada tahun 2017 naik menjadi sebesar 62.922.617 dan pada tahun 2018 naik secara signifikan menjadi 64.194.057. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan jumlah UMKM dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan.

Kabupaten Bangkalan merupakan Kota Gerbang utama menuju ke Pulau Madura, dimana laju ekonomi lebih baik dari pada Kabupaten lainnya seperti Sampang. Dalam peningkatan laju ekonomi yang salah satunya dari sisi UMKM, pemerintah Bangkalan melakukan usaha untuk mendorong kemajuan UMKM agar tidak kalah dengan kota lain. Salah satu usaha pemerintah Bangkalan yaitu mengadakan expo UMKM yang didalamnya terdapat kumpulan para UMKM untuk memperkenalkan hasil dari setiap UMKM. Selain itu, Pemerintah kabupaten juga di gandeng Kemenkominfo untuk sosialisasi belanja dan jualan online untuk UMKM. Dimana pengembangan ini sangat membantu UMKM bangkalan agar dikenal di seluruh kota bukan hanya di wilayah Bangkalan saja.

Tabel 1.2. Jumlah UMKM per Kecamatan Kabupaten Bangkalan

Kecamatan	Jumlah UMKM
Arosbaya	6163
Bangkalan	7693
Blega	11001
Burneh	7384
Galis	16221
Geger	13613
Kamal	4460
Klampis	9758
Kokop	12370
Konang	7825
Kwanyar	9065
Labang	4527
Modung	9313
Sepulu	8069
Socah	10382
Tanah Merah	11747
Tanjung Bumi	12066
Trageh	5111

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Bangkalan

Berdasarkan dari gambar 1.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Bangkalan tertinggi terdapat di Kecamatan Galis yang memiliki jumlah UMKM sebesar 162221. Kemudian Kecamatan di Bangkalan yang memiliki jumlah UMKM terendah terdapat di Kecamatan Kamal dengan jumlah UMKM sebesar 4460. Dan Kecamatan Bangkalan memiliki jumlah UMKM sebesar 7693. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah UMKM tertinggi terdapat di Kecamatan Galis.

Maka dari itu untuk menunjang peningkatan permintaan kredit yang sebanding dengan peningkatan UMKM, peranan perbankan khususnya BPR (Bank Perkreditan

Rakyat) dalam mendorong pembangunan seluruh sektor usaha dengan memberikan akses finansial kepada kemajuan UMKM sangat penting.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha dan dengan lokasi BPR yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

Bank perekreditan Rakyat diharapkan mampu menunjang pelaksanaan pembangunan secara nasional. BPR diharapkan berperan aktif dalam peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mrealisasikan misinya BPR melayani kebuutuhan masyarakat umumnya seperti nelayan, petani, pedagang, peternak, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan. Target layanan atau jasa ini masih belum terjangkau oleh bank umum. Dengan demikian BPR dapat lebih mampu mewujudkan pemerataan layanan perbanka, pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan berusaha, dan masyarakat terhindar dari kegiatan rentenir.

Sejalan dengan pesatnya kemajuan dan bisnis di Jawa Timur khususnya di Bangkalan, maka bisnis perbankan tumbuh semakin beraneka ragam jenisnya serta menawarkan berbagai produk, kemudahan akan modal dan fasilitas yang diberikan oleh bank. Sama halnya dengan Bank Perkreditan Rakyat di Bangkalan. Kabupaten Bangkalan memiliki 2 BPR yaitu BPR UMKM Jatim Cabang Bangkalan dan BPR

pemerintah Daerah Bangkalan. Dimana kedua BPR tersebut di kelola oleh pemerintah Daerah. Adapun kelebihan Masing-masing BPR bertujuan untuk mendorong perekonomian melalui usaha UMKM, Dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit usaha ataupun konsumtif. Selain itu, kedua BPR tersebut juga memiliki harapan terhadap masyarakat yang sejahtera.

BPR UMKM JATIM cabang Bangkalan dan BPR PD Bangkalan merupakan BPR milik Pemerintah Daerah yang mana memiliki banyak kelebihan antara lain proses mudah, letak strategis, bunga ringan, dan yang paling penting berbadan hukum sehingga keamanan tidak diragukan. Hal itu yang menjadi alasan peneliti memilih BPR milik Pemerintah Daerah sebagai objek penelitian. Hal itu dikuatkan dengan melakukan wawancara singkat dengan masyarakat bahwasannya yang paling banyak diminati yaitu BPR PD dan BPR UMKM JATIM cabang Bangkalan.

Pada umumnya tujuan seseorang melakukan permintaan kredit bagi kegiatan usaha: (a) untuk tujuan mendapatkan keuntungan usaha yang lebih baik, (b) adanya permintaan atau penjualan, yang dapat dilihat dari lokasi usaha, (c) ingin mendapatkan tingkat bunga yang lebih rendah, (d) membantu menambah modal untuk meningkatkan jumlah produksi yang dihasilkan, (e) adanya kenaikan harga bahan baku dan biaya-biaya operasional.

Modal merupakan hal yang penting dan paling utama dalam sebuah usaha yang akan dibangun. Dalam sebuah usaha tidak hanya di perlukan modal sendiri tapi juga dibantu dengan modal pinjaman. Dengan adanya modal pinjaman akan mempengaruhi peningkatan pendapatan dan produktivitas usahanya (Meisthya Pratiwi, 2013).

Selain modal usaha, keberhasilan perusahaan biasanya ditentukan dari keuntungan atau laba usaha yang diperoleh setiap harinya, semakin tinggi keuntungan yang dihasilkan maka semakin besar peluang kemajuan perusahaan tersebut. Semakin meningkatnya laba usaha maka pelaku usaha akan semakin mengembangkan usahanya, dan hal itu tentu membutuhkan tambahan dana, dengan cara pinjaman dana atau pinjam kredit (Monalisa, 2019).

Tingkat pendidikan sangat penting hal ini dikarenakan masyarakat yang teredukasi dapat meningkatkan inklusi keuangan disuatu daerah. semakin tinggi tingkat pendidikan maka seseorang akan lebih besar pula memahami informasi terhadap akses layanan keuangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh mizan dan Endang (2017) Analisis Pengaruh Tingkat pendapatan, Tingkat pendidikan, suku bunga, penetrasi Demografis Dan Geografis Perbankan Terhadap Total kredit UMKM.

Muhammad Yassir (2014) Hubungan antara jumlah Tanggungan keluarga berpengaruh terhadap permintaan kredit. Hal tersebut terjadi karena setiap penambahan jumlah tanggungan keluarga akan menambah beban konsumsi keluarga yang akhirnya akan menambah pengambilan kredit untuk memenuhi beban konsumsi.

Namun dalam proses penyalurannya, bank yang ditugaskan menyalurkan modal kerja maupun modal investasi memiliki banyak permasalahan di beberapa daerah salah satunya yaitu di Kabupaten Bangkalan yang terkendala mengenai akses bank pengkreditan itu sendiri, umumnya dalam satu kecamatan terdapat

minimal satu bank akan tetapi untuk akses BPR milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangkalan ini hanya terdapat dua kantor saja selain itu pelayanan kreditnya dianggap kurang baik, bunga kredit yang dibebankan kepada debitur yang masih tinggi. Faktor-faktor lainnya yang mungkin berpengaruh dalam permintaan kredit seperti modal usaha, keuntungan dalam usaha, dan karakteristik Nasabah. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka perlu adanya penelitian secara komprehensif mengenai “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di BPR Kabupaten Bangkalan (studi kasus Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah di Bangkalan)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini seperti berikut:

1. Apakah modal usaha berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit UMKM pada BPR milik Pemerintah Daerah di Bangkalan?
2. Apakah laba usaha berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit UMKM pada BPR milik Pemerintah Daerah di Bangkalan?
3. Apakah karakteristik nasabah (pendidikan) signifikan terhadap permintaan kredit UMKM pada BPR milik Pemerintah Daerah di Bangkalan?
4. Apakah karakteristik nasabah (tanggungan Keluarga) berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit UMKM pada BPR milik Pemerintah Daerah Bangkalan?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh modal usaha terhadap permintaan kredit UMKM pada Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah di Bangkalan.
2. Untuk mengetahui pengaruh laba usaha terhadap permintaan kredit UMKM pada Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah di Bangkalan.
3. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik nasabah (Pendidikan) terhadap permintaan kredit UMKM pada Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah di Bangkalan.
4. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik nasabah (tanggungan keluarga) terhadap permintaan kredit UMKM pada Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah di Bangkalan.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dan membantu dalam pengembangan keilmuan serta memberikan sumbangan pemikiran dalam penyaluran kredit UMKM.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dan bahan revisi dalam meningkatkan UMKM dengan penyaluran kredit.
- b. Bagi masyarakat, memberikan informasi dan wawasan pengetahuan tentang bagaimana penyaluran kredit dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di kota Bangkalan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan penelitian ini ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi kredit UMKM pada BPR Bangkalan studi kasus BPR milik Pemerintah Daerah.
- b. BPR Bangkalan milik Pemerintah: BPR Pemerintah Daerah Bangkalan dan BPR UMKM milik Pemerintah Jawa Timur Cabang Bangkalan.